

NOTULA

Penyampaian Rencana Aksi OGI 2020- 2022

Bantuan Hukum

I. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2020

Pukul : 13.30 – 16.50 WIB

Tempat : Zoom Meeting

Agenda : Penyampaian Rencana Aksi OGI 2020- 2022

Moderator : Kepala Seknas OGI

Peserta : Komisi Informasi Pusat

Kementerian Hukum dan Pertahanan

Biro Perencanaan Kejaksaan RI

Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas

Biro Perencanaan Mahkamah Agung

Tim CSO (YLBHI, PBHI, LBH Apik, IJRS)

Tim Sekretariat Nasional OGI

II. Diskusi Rapat

1. Kepala Sekretariat Nasional OGI menyampaikan paparan pengantar terkait Open Government Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) sebagai berikut:
 - a. OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melakukan praktik Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership), yang telah dimulai sejak tahun 2012. Melalui OGI, Pemerintah berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional.

- b. OGI telah mengeluarkan 5 rencana aksi dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Di tahun 2020, sedang berlangsung penyusunan rencana aksi yang akan diimplementasikan di tahun 2021-2022. Rencana aksi OGI tidak bersifat menambah program baru, tapi meningkatkan dampak dari program yang sudah ada. Saat ini, usulan rencana aksi sedang dalam tahap penajaman dengan K/L terkait. Setelah itu, rencana aksi akan didiskusikan bersama dengan mitra pembangunan dan melalui tahap konsultasi publik sebelum diserahkan ke OGP di bulan Desember 2020.
2. Perwakilan dari YLBHI menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Usulan rencana aksi terkait bantuan hukum meliputi (1) Pembangunan portal informasi terkait bantuan hukum, (2) Perluasan akses dan kapasitas layanan bantuan hukum, (3) Inklusi kelompok rentan dan gender dalam pemberian bantuan hukum bagi korban. (4) Penguatan dukungan penyelenggaraan bantuan hukum untuk akses informasi.
 - b. Terkait usulan pertama, portal informasi yang diminta adalah pengembangan dari portal yang sudah ada untuk menambah variabel penting dari pemberi bantuan hukum dan korban. Misalnya, ada informasi penting dari hasil indeks tahun lalu terkait proses pemberian bantuan. Selama ini beberapa variabel yang diharapkan ada, belum tampak di portal yang sudah ada. Informasi seperti: klasifikasi anak, gender, dan lainnya masih belum ada. Variabel yang berada di bawah menkopolkhankam juga perlu dipertimbangkan untuk masuk ke dalam rencana aksi.
 - c. Verifikasi data adalah pekerjaan besar yang menyita waktu, tapi hal ini dapat dimulai di tahun 2021 dengan membicarakan variabel-variabel yang perlu ditambahkan. Selanjutnya, di tahun 2022, ada proses pengembangan portal yang sudah ada atau membuat portal baru.
 - d. CSO siap untuk melanjutkan pembicaraan secara intensif dengan K/L terkait. Pada pengalaman sebelumnya, karena waktu yang singkat, perumusan indikator tidak terlalu akurat dan tidak dapat terjangkau.

- e. Jika memungkinkan, apakah ada respon BPHN secara tertulis atas usulan-usulan dari CSO yang sudah disampaikan.
 - f. Terkait usulan kedua, hanya ada 2 OBH di Papua yang terverifikasi sehingga usulan ini cukup penting untuk dilaksanakan.
 - g. Terkait usulan ketiga, jika melihat sitbankum, data cukup menunjukkan arah orientasi kebijakan hukum nasional. Akan tetapi, data tersebut lebih berorientasi kepada bantuan hukum bagi pelaku. Oleh karena itu, usulan yang ingin diimplementasikan adalah bantuan hukum kepada korban.
 - h. Terkait usulan keempat, hal ini sudah didiskusikan dengan KIP. Banyak sekali proses adjudikasi yang dilakukan CSO sektor hukum terkait sengketa informasi. Dalam hal ini, CSO mengedepankan sengketa informasi karena menyangkut hak masyarakat mendapatkan informasi.
3. Perwakilan dari BPHN menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Mengenai pembangunan portal, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, sudah ada penyusunan anggaran di tahun 20221, jadi hal ini tidak bisa dilakukan. Kedua, BPHN perlu menindaklanjuti penyusunan MoU yang sebelumnya sudah ada terkait program bantuan hukum sehingga usulan ini perlu di selaraskan dengan program yang ada. Di tahun 2016, sudah ada pembicaraan untuk mengintegrasikan data MA dan BPHN, tetapi hingga sekarang belum selesai karena belum ada tindak lanjut MoU.
 - b. Sebelum membangun portal, semua pihak perlu menyepakati hal-hal yang menjadi domain masing-masing. Data masyarakat rentan sudah ada di sitbankum. Oleh karena itu, penambahan variable dan integrasi dengan MA perlu dibicarakan lebih dalam.
 - c. Terkait perluasan akses Bantuan Hukum, pada tahun 2021 BPHN akan melaksanakan program verifikasi dan akreditasi OBH. Saat ini, baru ada 524 OBH yang terakreditasi. Meskipun program ini akan menyita anggaran dan waktu, verifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas bantuan hukum. Saat ini, hanya 40% bantuan hukum yang tersedia di Indonesia. Oleh karena itu,

kegiatan ini akan menjadi fokus. Namun, perlu adanya koordinasi dengan Kemendagri juga. Selain itu, perlu adanya pelibatan paralegal dari tenaga penyuluh desa yang juga perlu dibicarakan dengan Kemendesa PDTT.

- d. Terkait inklusi kelompok rentan dan gender, BPHN juga memiliki pemikiran yang sama. Namun, layanan bantuan hukum diberikan kepada seluruh masyarakat sesuai perundang-undangan. Dalam aplikasi sitbankum terdapat kolom isian untuk penyandang disabilitas, gender, jenis perkara, dan sebagainya sehingga dapat dilihat berapa yang telah mendapatkan bantuan hukum. Dalam usulan ini, LPSK perlu dilibatkan.
 - e. Terkait akses informasi, salah satu perkara yang dapat diberikan bantuan adalah perkara ajudikasi sengketa informasi. Oleh karena itu, akses informasi diperlukan dalam hal ini. Namun, jika bantuan terkait sengketa informasi masih kurang kuat, usulan ini dapat didiskusikan lebih dalam.
4. Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Beberapa indikator yang diusulkan perlu disesuaikan lagi dengan kondisi yang ada. Misalnya, pembentukan portal informasi yang terintegrasi belum masuk dalam kegiatan yang direncanakan. Masing-masing K/L sudah memiliki putusan SIPP, sehingga perlu ada pembicaraan detail dalam rapat awal terkait perlunya membuat grand design kemudian baru membangun portalnya.
 - b. Portal informasi yang sudah ada saat ini adalah sitbankum. Oleh karena itu, sebaiknya kegiatan yang diusulkan bertujuan untuk mengoptimalkan sistem yang sudah ada. Saat ini, sitbankum masih digunakan sebagai portal data. Penambahan menu di sitbankum mungkin tidak akan menggunakan banyak anggaran. Misalnya, sitbankum ditambah dengan fitur layanan konsultasi. Namun, jenis fitur-fitur yang diminta perlu dibicarakan lagi. Penambahan ini juga diharapkan agar sitbankum dapat menghasilkan data yang lebih detail. Dalam hal ini, pengelolaan internal dan mekanisme

pelayanan juga harus dipikirkan. Pada tahap awal, perlu adanya konsolidasi data terlebih dahulu. Sinergi data di BPHN dan MA juga dapat membantu proses penganggaran.

- c. Kebutuhan integrasi data BPHN dan MA memang ada untuk mendorong keefektifan bantuan hukum karena saat ini sistem belum terintegrasi. Koordinasi sejauh ini masih menggantung karena SOP di pusat belum ada. Oleh karena itu, perlu adanya penentuan K/L mana yang akan memimpin kegiatan dalam integrasi portal ini.
- d. Jika rencana aksi ini disepakati, harus ada penganggaran di tahun 2021 agar penguatan portal dapat dilakukan di tahun 2022. Portal informasi nantinya dapat menampung data dari sitbankum dan dari lainnya agar ada interoperabilitas data.
- e. Menurut program bantuan hukum dalam UU no. 16, anggaran bantuan hukum disalurkan melalui OBH. Pengadilan sudah lama mengimplementasikan hal ini bahkan sebelum ada UU bantuan hukum, dengan 3 pelayanan yakni pembebasan biaya, pos pelayanan, dan pengadilan keliling.
- f. Namun, penentuan indikator capaian dalam matriks harus dibicarakan lagi sebelum difinalisasi. Perlu ada waktu untuk mendiskusikan secara dalam agar indikator capaian dapat terjangkau dan realistis. Semua pihak harus hadir agar CSO juga dapat menyampaikan kebutuhannya. Pemimpin diskusi nantinya adalah Seknas OGI selaku motor penggerak diskusi.
- g. Terkait usulan kedua, kegiatan ini juga perlu didorong. Jika sudah ada proses akreditasi dan verifikasi di tahun 2021, rencana data-data BPHN juga perlu dikumpulkan agar strategi untuk anggaran OBH di tahun 2022 dapat dibuat. Terkait indikator terakhir yakni pengawasan standar layanan, perlu ada cara penilaian yang difokuskan. Dalam hal ini, pihak OBH dapat membantu dalam kegiatan *outreach* OBH di Papua.
- h. Tim untuk membahas kebutuhan Revisi UU Bantuan hukum perlu didorong. Saat ini, Pusanev BPHN sudah mulai mendata kebutuhan

untuk revisi. Hal ini dapat menjadi pintu untuk diskusi kebutuhan yang ada.

- i. Terkait usulan keempat, ada target penyelesaian sengketa informasi di RPJMN. Misalnya ada target terkait adjudikasi, sehingga bantuan dari pihak mana saja tidak menjadi masalah.
 - j. Untuk data pemberian bantuan hukum bisa dilihat dari klasifikasi data perkara yang diberikan bantuan hukum. BPHN didorong untuk menyusun data berdasarkan segregasi info sesuai dengan kebutuhan. Namun, perlu diskusi lebih dalam terkait dukungan anggaran yang proporsional.
5. Perwakilan dari Biro Perencanaan Mahkamah Agung menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Ada bantuan hukum non-litigasi dari MA untuk memberikan advis informasi untuk perkara perdata yang bersifat arahan. Jika sudah masuk ranah pengadilan yakni pendampingan, bukan merupakan ranah Mahkamah Agung melainkan Kemenkumham. MA akan melelang posisi advokat bantuan hukum ini dan diberikan tarif per jam layanan. Sementara itu, pendampingan dari Kemenkumham diberikan per perkara.
 - b. Ada beberapa kemudahan yang diberikan MA. Pertama, ada layanan pembebasan biaya di semua tahap pengadilan bagi masyarakat miskin. Selain itu, terkait kemudahan akses, ada sidang di luar pengadilan bagi yang kesulitan untuk datang ke pengadilan. Ketiga, ada sidang terpadu identitas hukum untuk orang-orang yang tidak mempunyai akte kelahiran. Ini adalah bantuan-bantuan yang diberikan untuk masyarakat marginal. Untuk realisasi dan publikasinya ada di dirjen.
 - c. Saat ini, pengajuan pembebasan biaya di semua jenis perkara sudah dipermudah. Pada pemeriksaan awal, jika mereka menunjukkan SKTM maka pembiayaan akan dibebaskan.
6. Perwakilan PBHI menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Terkait usulan penguatan portal informasi, usulan ini penting dan *urgent* untuk mendorong adanya obyeksi penerima manfaat.

Seringkali, ada verifikasi ulang agar pengajuan dapat dikabulkan. Dengan adanya portal informasi yang sama, diharapkan adanya integrasi dan korelasi di BPHN dan MA.

- b. Perlu adanya integrasi yang baik antara bantuan hukum dengan Posbankum dan pembebasan biaya perkara sehingga pemberian bantuan hukum dapat lebih maksimal.
- c. Perluasan akses dan kapasitas layanan bantuan hukum merupakan *follow up* RAN OGI periode sebelumnya. Kami mengusulkan kegiatan ini karena OBH yang terverifikasi hanya banyak di kota besar, sehingga tidak ada akses bantuan hukum di kota kecil. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi dari K/L untuk meningkatkan jumlah OBH di beberapa daerah. Terkait indikator capaian ke 4, hal ini mengaju pada dispensasi khusus di Papua dimana jumlah OBH minim sekali.

7. PoC OGP menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Terkait usulan penguatan portal, cukup menambahkan adanya data terpilah yang detil. Dalam hal ini, YLBHI dapat merumuskan bahan-bahan yang dibutuhkan.

8. Perwakilan Direktorat Politik dan Komunikasi menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa informasi menjadi prioritas. Pemberian bantuan hukum tidak dibatasi sehingga dapat didampingi hingga masalah selesai. Namun, pemberian bantuan hukum tidak hanya spesifik terkait sengketa informasi. Pemberian bantuan hukum memiliki cakupan yang sangat luas.

9. Perwakilan Komisi Informasi Pusat menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:


- a. Akses informasi untuk bantuan hukum mengacu kepada pasal 4 mengenai bantuan hukum, yakni bantuan diberikan terkait perkara pidana dan tata negara. Sementara itu, sengketa informasi baru dapat masuk ke lembaga jika ada putusan keberatan di komisi informasi. Muara dari sengketa informasi berada di pengadilan tata negara, dan jika BUMN berada di PTUN.

- b. Jika dapat ditafsirkan, sengketa informasi dapat masuk non-litigasi sehingga dapat diberi bantuan hukum. Jadi, jika advokat ingin membantu masyarakat, tidak akan menjadi masalah. KIP tidak pernah melimitasi bantuan hukum.
- c. Terkait indikator 2, standar layanan informasi sudah ada, tapu keterbukaan bantuan hukum bukan merupakan ranah KIP.


III. Tindak Lanjut

- 1. Seknas OGI akan mengundang Kementerian/Lembaga terkait dalam rapat lanjutan untuk mendiskusikan indikator capaian selama periode pelaksanaan RAN OGI 2020-2022.


IV. Dokumentasi



Ichi Cahyani OGI



KAPUSLUHBANKUM_BPHN



Febio Nesta

Recording

RENAKSI OGI 2020 – 2022

YLBHI, ASOSIASI LBH APIK INDONESIA, IJRS, PBHI, LBH APIK JAKARTA, LBH MASYARAKAT, LBH ACEH, LBH JAKARTA, LBH BANDUNG, LBH PAPUA DAN TIFA

22 – 23 OKTOBER 2020

Participants (44)

Search

Ichi Cahyani OGI (me)

Erie Febriyanto (Host)

April Pattiselanno Putri

KAPUSLUHBANKUM_BPHN

Tata Kelola

Aditya Nuriya_KIP

Afif Abdul Qoyim

agus digdo nugroho

Agus Wijayantonugroho-...

Andri Setya Nugraha

Arfan-Biro Hukum dan Hu...


Awlia Ghea Kartika

Chandra Kirana


Chikita Edrini

Dewi Resminingayu OGI

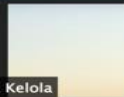
Dewi Sri S_BAPPENAS



Erie Febriyanto



Aditya Nuriya_KIP



Tata Kelola

Recording

RENAKSI OGI 2020 – 2022

YLBHI, ASOSIASI LBH APIK INDONESIA, IJRS, PBHI, LBH APIK JAKARTA, LBH MASYARAKAT, LBH ACEH, LBH JAKARTA, LBH BANDUNG, LBH PAPUA DAN TIFA

22 – 23 OKTOBER 2020

Participants (44)

Search

Dio Ashar (IJRS)

Dirbinganisminditun

Febio Nesta

Febri Biro Perencanaan Ke...

Gina Sabrina - PBHI

Indah - BPHN

Indra - Bappenas

JAMPIDSUS

KAPUSLUHBANKUM_BPHN

KIP - Bernard Yuari

MA-Biro Renog Arifin

Marcelino Latuputty - Ditk...

nanda

Naomi Simanjuntak- Dit. H...

Rahel_birocanakejaksaan

Rahma Marv

TOTOK B (KASUB...

Sunproglap Pidu...

Dewi Sri S_BAPPE...

Recording

RENAKSI OGI 2020 – 2022

YLBHI, ASOSIASI LBH APIK INDONESIA, IJRS, PBHI, LBH APIK JAKARTA, LBH MASYARAKAT, LBH ACEH, LBH JAKARTA, LBH BANDUNG, LBH PAPUA DAN TIFA

22 – 23 OKTOBER 2020

Participants (44)

Search

NS

Naomi Simanjuntak- Dit. H...

R

Rahel_birocanakejaksaa...

RM

Rahma Mary

R

Retno KIP

Rezafaraby

SY

Siti Yanuarina

subeno trio leksono

S

Sudiyono

SP

Sunproglap Pidum Kejagung

tanti dian ruhama

Tata Kelola

TM

Teguh Magzan

TB

TOTOK B (KASUBDIT PEL...

Totok Yuliyanto

TK

Triana Komalasari

TW

Tyo Widagdo